

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1984. Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Akademik Presindo, Jakarta
- Chomzah, H. Ali Achmad, 2003. Hukum Agraria (pertanahan) Indonesia Jilid 1, Jakarta Prestasi Pustaka,
- H.A.W. Widjaya, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cet. II, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Isnur, Eko Yulian, 2012. Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Tanah dan Rumah, Jakarta PT. Buku Seru
- Pamudji, S. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta Bumi Aksara
- Poerwadarminta, W.J.S., 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka
- Prajogo Soesilo, 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual
- Redaksi Visimedia, 2008. *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM*, Jakarta, Visimedia,
- Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat*, Tangerang Interaksara.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta,
- Singarimbun, M dan S. Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung Alfabeta
- Sutedi, Adrian, 2011. *Sertifikat Hak atas Tanah*, Jakarta Sinar Grafika
- Sutoro Eko, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru*, ( Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia,)
- Syarief, Elza, 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010. *“Kompilasi Hukum Agraria” Seri Kompilasi Perundangan*, Yogyakarta Pustaka Yustisia,

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.  
Pidato Menteri Dalam Negeri, “Tanah Berfungsi Sangat Vital Bagi Bangsa dan Negara”.  
(Yogyakarta Kedung Keris, Ngipar, 12 Januari 1982).  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 51 tahun 1960 Tentang  
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.  
peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran  
Negara Tahun 1961 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171).  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik  
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri  
Agraria Nomor 9 tahun 1959 mengenai Penerbitan Sertifikat Hak Milik  
Instruksi Menteri Negara/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 Tanggal 20 Juli 1998,  
tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk tanaman Pangan.  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tanggal 15 Agustus 1981  
Tentang Proyek Nasional Agraria.  
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata  
Cara Penggantian Sertifikat Hak atas Tanah.  
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1989 tentang  
Penggunaan Blanko Sertifikat Yang Baru